



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA**

TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang ke-3 yaitu peningkatan perekonomian serta memperhatikan pula beberapa isu krusial yaitu naiknya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta (dari 7,27% di tahun 2020 menjadi 7,69% di tahun 2021), meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dari 47.856 di tahun 2020 menjadi 50,461 di tahun 2021 (atau naik sebesar 5,44%), kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,24% (dari 1,95 % tahun 2020 menjadi 2,19% tahun 2021), rendahnya ratio kesempatan kerja untuk usia produktif sebesar 0,336%, meningkatnya angka sengketa perusahaan-pekerja sebesar 53,25% (dari 16,23 % tahun 2020 menjadi 69,48% tahun 2021), pencapaian SPM bidang sosial serta isu tentang Data kemiskinan dan penanganan pandemi Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
13. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
27. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2021 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu perolehan penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A, berhasil direalisasikan nilainya A pula. Adapun tingkat realisasi keuangan program ini adalah 86,03 %. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasi fisiknya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut adalah:
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), RKA/DPA OPD, koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
 - b. Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah. Aktivitas kegiatan ini meliputi pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi. Kegiatan ini melaksanakan berbagai aktivitas operasional perkantoran. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 100%.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

RENA DI SOSNAKERTRANS 2023

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan, gedung/kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Pemberdayaan Sosial, dari target fisik berhasil direalisasikan sebesar 100 % pada semua sub kegiatannya. Adapun realisasi keuangan kinerja program sebesar 90,58%. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan 3 sub kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat.
 - b. Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat.
 - c. Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
3. Program Rehabilitasi Sosial, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 99,63 % dan realisasi keuangan program ini sebesar 64,99 %. Hanya terdapat 2 (dua) kegiatan pada program ini, yakni:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dalam kegiatan ini mengakomodasi penyelenggaraan pengasuhan anak terlantar di RPA Wiloso Projo dan pelayanan sosial lanjut usia terlantar di RPSLU Budhi Dharma serta layanan rehabilitasi sosial lainnya.
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKs) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Panti Sosial. Kegiatan ini dijabarkan dengan penyelenggaraan layanan kedaruratan meliputi fasilitasi permukiman untuk warga OTG Covid yang melakukan isolasi di shelter, bantuan sosial Santunan Kematian, Orang terlantar kehabisan bekal, bantuan pemakaman jenazah terlantar baik Covid maupun Non Covid, bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pelatihan dan motivasi bagi penyandang disabilitas, gelandangan pengemis, perempuan korban kekerasan dan rawan ekonomi.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan program ini mencapai sebesar 55,69 %. Terdapat 2 kegiatan dalam program ini yaitu:
 - a. Pemeliharaan Anak Terlantar
Pada kegiatan ini dilakukan upaya pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap penerapan Standard Nasional pengasuhan anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin
Kegiatan ini meliputi pengelolaan data kemiskinan, penyaluran berbagai bantuan sosial bagi PMKS baik yang bersumber dana dari APBN maupun APBD, antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin), warga terdampak covid dan UEP PKH.
5. Program Penanganan Bencana, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangannya mencapai 66,23 %.
Program ini terdiri dari dua kegiatan antara lain :
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pengadaan dan pengelolaan bufferstock logistik makanan dan sandang, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
Aktivitas yang tercakup dalam kegiatan ini koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, mencapai realisasi kinerja fisik sebesar sebesar 100 % dari target dan realisasi keuangannya mencapai 98,77 %.
Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
7. Program Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 93,39 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 97,90 %. Adapun program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
Kegiatan ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster kompetensi.
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kegiatan ini melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
 - c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Kegiatan ini melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
9. Program Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 99,85% dan realisasi keuangannya mencapai 94,44%. Adapun Program ini terdiri dari tiga kegiatan, antara lain:
- a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja yaitu pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri dantenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya.
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain pelayanan dan informasi pasar kerja online dan job fair/bursa kerja.
 - c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini adalah koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
10. Program Hubungan Industrial, dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 94,58%. Adapun program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini meliputi pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini meliputi pencegahan dan perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 98,39%. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pelatihan Transmigrasi;
- d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi.

Pada tabel 2.1. dapat pula dianalisa pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program Renstra bahwa capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) program yang tingkat realisasinya mencapai > 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Pemberdayaan Sosial (104,99%), Rehabilitasi Sosial untuk indikator Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (107,99%), Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (100,20%);
2. Terdapat 6 (enam) program yang tingkat realisasinya mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial untuk indikator Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator PPKS terlantar yang tertangani, Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

3. Terdapat 4 (empat) program yang tingkat realisasinya mencapai < 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (94,46%), Perencanaan Tenaga Kerja (96,09%), Penempatan Tenaga Kerja (99,74%), Hubungan Industrial (79,36%);

Realisasi kinerja sebagian program sesuai bahkan melebihi target fisik perencanaan disebabkan beberapa faktor:

1. Perencanaan yang cukup baik. Penentuan target yang cukup realistis untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi dan dinamikanya;
2. Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mitra kerja, masyarakat, perusahaan, maupun instansi terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada;
3. Anggaran yang cukup.

Dan beberapa program belum mencapai target kinerja untuk masing-masing indikatornya, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya perluasan sasaran pemberian bantuan sosial dari pusat yang mengakibatkan bantuan sosial APBD tidak dapat diterimakan secara keseluruhan mengingat di sisi lain terdapat kebijakan tidak diperkenankannya dobel intervensi/penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Akibatnya capaian kinerja program Perlindungan dan jaminan sosial tidak mencapai target.
2. Berkaitan dengan program penempatan tenaga kerja tidak mencapai target kinerja renja karena dalam implementasi program kegiatannya kurang direspon dengan maksimal oleh sasaran kinerja dalam hal ini tenagakerja di Kota Yogyakarta. Sebagian tenaga kerja tidak berminat untuk mengisi lowongan kerja yang disediakan dan difasilitasi disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja (baik dari aspek jenis maupun lokasi pekerjaan yang ditawarkan). Para tenaga kerja lebih berminat pada pekerjaan administrasi perkantoran dan yang lokasinya di dalam Jawa. Akibatnya persentase penempatan tenaga kerja tidak mencapai target renja.
3. Adapun terkait pencapaian kinerja program hubungan industrial tidak mencapai target kinerja karena persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial baru mencapai 29,57%. Hal ini disebabkan oleh:

- a. banyaknya perusahaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sarana hubungan industrial antara lain dari aspek upah minimum di masa pandemi Covid-19,
- b. pemantauan fisik oleh pengawas tidak dapat dilaksanakan secara optimal di masa pandemi, sementara perusahaan sebagian tidak mengimplementasikan aplikasi Wajib Laport terkait Data Sarana Hubungan Industrial. Dengan demikian banyak perusahaan yang terdata belum mempunyai sarana hubungan industrial.

Terkait dengan realisasi keuangan beberapa analisa penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa program khususnya yang *mengcover* kegiatan pemberian bantuan sosial, yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan pusat (Kementerian Sosial RI) yang memperluas sasaran penerima manfaat bansos pusat. Sementara di sisi lain terdapat pula kebijakan tidak diperkenalkannya penerimaan ganda bantuan sosial oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik dari anggaran pusat maupun bersumber dari anggaran daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya realisasi keuangan untuk program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial.
2. Program kegiatan bidang sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagian bersifat *unpredictable* kuantitas sasarannya karena menyesuaikan dinamika kebutuhan lapangan. Hal ini menyebabkan pencapaian keuangan program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana kurang optimal (< 70%).

Strategi perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk penyempurnaan performa kerja organisasi di masa mendatang antara lain:

- a. Perlu peningkatan kecermatan dalam perencanaan, terutama mengenai hal-hal yang sulit diprediksikan mengingat sebagian kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersifat adang-adang (*unpredictable*) karena keterkaitan dengan faktor-faktor dari luar
- b. Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|------------|------|------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 0,00 | 0,00 | | 42.647.000,00 | 100,00% | 42.647.000,00 | 100,00% | 41.164.400,00 | 96,52% | | | | | | o u t p u t b a r u |
| | | Barang cetakan/penggandaan | | 0 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 15 Kegiatan | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 0,00 | 0,00 | | 6.900.000,00 | 100,00% | 6.900.000,00 | 100,00% | 5.330.000,00 | 77,25% | | | | | | o u t p u t b a r u |
| | | Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | 0 buku | | 0 buku | 12 buku | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 0,00 | 0,00 | | 378.932.000,00 | 100,00% | 378.932.000,00 | 100,00% | 342.337.619,00 | 90,34% | | | | | | o u t p u t b a r u |
| | | Penyediaan makan dan minum rapat | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | 15 kegiatan | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi/konsultasi | | 0 kegiatan | | 0 kegiatan | 14 kegiatan | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 0,00 | 0,00 | | 12.200.000,00 | 100,00% | 12.200.000,00 | 100,00% | 12.096.000,00 | 99,15% | | | | | | o u t p u |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--------|---------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Bangunan Lainnya | Jasa pemeliharaan gedung | | 00 | | 00 | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif | Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring | | 90,00% | 0,00 | 84,59% | 0,00 | 87,18% | 590.621.507,00 | 87,18% | 590.621.507,00 | 91,53% | 535.008.182,00 | 90,58% | | | | | Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | 0,00 | | | 221.238.750,00 | 100,00% | 221.238.750,00 | 100,00% | 203.506.750,00 | 91,99% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan BSD dan BSL | | 0 kali | | 0 kali | | 1 kali | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PSM yang mendapat penyuluhan | | 0 kali | | 0 kali | | 1 kali | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan TKSK | | 0 orang | | 0 orang | | 14 orang | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |

RENA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 0,00 | 0,00 | 338.642.757,00 | 100,01% | 338.642.757,00 | 100,01% | 302.621.432,00 | 89,36% | | | | | | |
| | | Bantuan Operasional PSKS kepada K3S, Pepabri, Karang Taruna, PWRI, IPSM, dan Yayasan Anak Mandiri | | 0 lembaga | 0 lembaga | 6 lembaga | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | Kunjungan Relawan kepada Lansia melalui Jogja Sapa Lansia | | 0 lansia | 0 lansia | 50 lansia | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tematik Lansia | | 0 kali | 0 kali | 3 kali | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) | | 0 kali | 0 kali | 1 kali | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | PSKS (Karang Taruna, LKS, WKSBM) yang mendapat penyuluhan | | 0 orang | 0 orang | 945 orang | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan 2 puskesmas | | 0 kali | 0 kali | 2 kali | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | 3 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan | | | 0,00 | 0,00 | 30.740.000,00 | 100,00% | 30.740.000,00 | 100,00% | 28.880.000,00 | 93,95% | | | | | | o u t p u t b a r u |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------|------|---------|----------|----------|-------------------|---------|-------------------|----------|------------------|---------------|--------|--|--|--|--|----------------------------|
| | | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | | 0 orang | | 0 orang | 60 orang | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 91,77% | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | Rerata persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga | 87,00 % | 0,00 | 91,57 % | 0,00 | 81,00 % | 12.098.992.249,00 | 81 % | 12.098.992.249,00 | 87,7 % | 7.863.362.323,73 | 100,00 % | 64,99% | | | | | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial | Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial | 100,00 % | 0,00 | nu - | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | 100,00 % | 0,00% | | | | | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Pantis Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyediaan Perumahan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 108.000.000,00 | 100,00% | 108.000.000,00 | 100,00% | 108.000.000,00 | 100,00% | | | | | | Output baru |

RENA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|------------|------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | bimtek pengembangan KUBE | | 0 kelompok | 0 kelompok | 20 kelompok | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergantung dalam kube dan usep | | 0 kelompok | 0 kelompok | 458 kelompok | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 12 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas | | | 0,00 | 0,00 | 43.055.832,00 | 100,00% | 43.055.832,00 | 100,00% | 43.008.707,00 | 99,89% | | | | | | O u t p u t b a r u |
| | | | Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Penyandang Pengemis dan Masyarakat | | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | Temu Penguatan Kapasitas Anak Terlantar dan Keluarga Sebanyak 150 Orang | | 0 orang | 0 orang | 100 orang | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 13 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas | | | 0,00 | 0,00 | 181.732.836,00 | 100,00% | 181.732.836,00 | 100,00% | 181.507.949,00 | 99,88% | | | | | | O u t p u t b a r u |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---------|---------|----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | 16 | Perwakilan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 0,00 | 0,00 | 161.508.832,00 | 100,00% | 161.508.832,00 | 100,00% | 161.476.707,00 | 99,98% | | | | | | |
| | | Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas | | 0 kali | 0 kali | 1 kali | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | |
| | 17 | Perwakilan Layanan Kedaruratan | | | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 100,00% | 1.586.000,00 | 100,00% | 1.586.000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | Operasional Pelayanan Kedaruratan Sosial | | 0 kali | 0 kali | 5 kali | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | |
| | 18 | Perwakilan Layanan Kedaruratan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma | | | 0,00 | 0,00 | 75.659.000,00 | 100,00% | 75.659.000,00 | 100,00% | 54.373.600,00 | 71,87% | | | | | | O u t p u t B a r u |
| | | Pemberian layanan kedaruratan lansia di UPT RPSLU berupa shelter dan Day Care bagi lansia | | 0 orang | 0 orang | 59 orang | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | |
| | 19 | Perwakilan Pelayanan Penelusuran | | | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 100,00% | 1.440.000,00 | 100,00% | 1.390.000,00 | 96,53% | | | | | | O u t p u t |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---------|------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Pemberian Motivasi Mental, Spiritual, dan Sosial bagi ABH | | 0 orang | | 0 orang | 15 orang | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. | | | 0,00 | | 0,00 | | 59.166.832,00 | 100,00% | 59.166.832,00 | 100,00% | 59.134.707,00 | 99,95% | | | | | | | 0 | | |
| | | | Rekomendasi keringanan biaya pendidikan dan Penjaminan Kesehatan bagi warga miskin | | 0 orang | | 0 orang | 150 orang | | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | 99,63% | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | | | | |
| | Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga | 85,00% | 0,00 | 78,97% | 0,00 | 87,30% | 13.454.538.478,00 | 87,30% | 13.454.538.478,00 | 82,46% | 7.492.723.728,00 | 55,69% | | | | | | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani | Jumlah PPKS terlantar yang tertangani/ Jumlah PPKS yang seharusnya tertangani | 100,00% | 0,00 | nuil% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | | | | | | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pemantauan | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12.450.000,00 | 100,00% | 12.450.000,00 | 100,00% | 12.450.000,00 | 100,00% | | | | | | | | | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|---------|------|----------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------|--|--|--|--|---|
| | Angka pengurangan | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non Formal | Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal / Jumlah Peserta Pelatihan x 100 % | 91,40 % | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | 91,00 % | 1.740.303.910,00 | 91 % | 1.740.303.910,00 | 91,8 % | 1.703.832.520,00 | 97,90% | | | | | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.608.717.050,00 | 100,00 % | 1.608.717.050,00 | 100,00 % | 1.573.220.000,00 | 97,79% | | | | | Output baru |
| | | | Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan | | 0 orang | | | 0 orang | 38 orang | | 100,00 % | | | 100,00 % | | | | | | |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | 0,00 | | 0,00 | | 115.881.200,00 | 100,00 % | 115.881.200,00 | 100,00 % | 115.320.000,00 | 99,52% | | | | | Output baru |
| | | | Lembaga Pelatihan kerja yang dibina | | 0 LPK | | | 0 LPK | 30 LPK | | 100,00 % | | | 100,00 % | | | | | | |
| Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | 0,00 | | 0,00 | | 15.705.660,00 | 100,00 % | 15.705.660,00 | 100,00 % | 15.289.700,00 | 97,35% | | | | | Output baru |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|--|-------------|---|--|
| | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 0% | | 0% | | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya rekomendasi atas permasalahan ketenagakerjaan se-DIY | | 0 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | |
| | 5 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 0,00 | | 0,00 | | 126.458.000,00 | 100,00% | 126.458.000,00 | 100,00% | 124.458.000,00 | 98,42% | | | | | | | Output Baru | | |
| | | Penanganan kasus hubungan industrial | | 0 Kasus | | 0 Kasus | | 50 Kasus | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 96,54% | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | |
| | Angka pengurangan menurun | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigran | jumlah calon transmigran yang berangkat /jumlah kuota transmigran)* 100% | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 171.506.875,00 | 100% | 171.506.875,00 | 100,00% | 168.752.500,00 | 98,39% | | | | | | Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|------------|--------------|---------------|---------|---|---------|---------------|---------------|--------|---|--|--|--|-------------|
| | 4 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi | | | 0,00 | 0,00 | | 57.000.000,00 | 100,00% | 57.000.000,00 | 100,00% | 56.970.000,00 | 100,00% | 99,95% | | | | | output baru |
| | | Pembelian perbekalan kepada calon transmigrasi | | 0 KK | 0 KK | 5 KK | | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | 100,00% | 98,38% | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | 33.296.364 | 868,00 | 68,0 | 412,1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33.296.364,8 | 0,22 | 53,20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,89 | | | | | | | | | | |
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%) | | | | | | | | | | | | 99,87% | 67,31% | | | | | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11) | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : Jejaring Kerja yang kooperatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Pandemi COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : Penetapan target fisik dan keuangan bulanan perlu melihat kembali realisasi bulanan pada triwulan I-IV tahun sebelumnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : 1. Untuk mendukung capaian indikator program dan sasaran di tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa hal yaitu: a. Penyusunan perangkaan DTKS b. Peningkatan frekuensi kebersihan TMP di anggaran perubahan 2022 c. Optimalisasi koordinasi dengan Dinsos DIY terkait stock logistik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Yogyakarta, 2022 Disusun oleh Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | Yogyakarta, 2022 Dievaluasi Oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | | | | | | | Drs. Maryustion Tonang, M.M NIP. 196606141994031006 | | | | | Agus Tri Haryono, ST. MT. NIP. 197203061996031004 | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi termuat dalam Tabel 2.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa target yang ditetapkan tahun 2021 tercapai. Di awal tahun 2021 ditetapkan target indikator kinerja urusan sosial tahun 2021 yakni Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 85,96. Realisasi indikator ini sebesar 88,70 atau tingkat realisasi sebesar 101,72%. Pada urusan tenaga kerja, terdapat dua indikator kinerja yakni Persentase jumlah penganggur dan Persentase peningkatan upah minimum. Target indikator Persentase jumlah penganggur Tahun 2021 sebesar 5,71% - 4,80% dan terealisasi 9,13%. Persentase peningkatan upah minimum ditargetkan sebesar 1,43 % dan terealisasi sebesar 4,08 % atau tingkat realisasi 285,31 %. Tabel 2.2. juga mengakomodasi perubahan Renstra yang direncanakan pada awal tahun 2022 yaitu terdapat penambahan indikator kinerja OPD (terkait transmigrasi), perubahan indikator kinerja OPD terkait kesejahteraan tenaga kerja yang semula diukur dari peningkatan Upah Minimum Kota menjadi persentase perusahaan yang melaksanakan struktur dan skala upah, serta terdapat perubahan target terkait indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|--|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial | | | 85.96 | 86.93 | 87.76 | 89.46 | 88.70 | - | 87.76 | 89.46 | |
| 2. | Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM): Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | 100 | 86.84% | 88.16% | 89.47% | 100 | - | 88.16% | 89.47% | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|------|---|--------|---------------|--|
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| | Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | | 100 | 83.87% | 87.10% | 90.32% | 100 | - | 83.87% | 87.10% | |
| | Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | 100 | 56.41% | 56.41% | 56.41% | 100 | - | 56.41% | 56.41% | |
| | Persentase Jumlah Warga Negara korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 3. | Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran | | | | 18.75 | 15.63 | 18.75 | - | - | 15.63 | 18.75 | |
| 4. | Persentase Jumlah Penganggur | | | 5.71%-4.80% | 5.51%-4.86% (9,13%) | 8.63% - 8.98% | 8.41% - 8.83% | 9.13 | - | 9.13% | 8.63% - 8.98% | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------|---------|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|--|
| 5a. | Persentase Peningkatan Upah Minimum | | | 1,43% | 4,48% | - | - | 4,08% | - | - | - | |
| 5b. | Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah | | | | 3%-3,8% | 3,8%-4,6% | 4,6%-6,2% | 4,08% | - | 3,8%-4,6% | 4,6%-6,2% | |

Tabel 2.2 juga menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Permendagri No 100 Tahun 2018. Terdapat 5 (lima) indikator layanan SPM yang masing-masing tercapai 100 % sesuai target.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain :

- a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai unit kerja;
- c. Penetapan standar operasional yang jelas;
- d. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja secara berkala.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

- a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- c. Pemanfaatan jejaring kerja daerah dan nasional secara optimal

Meskipun faktor-faktor di atas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain meliputi:

- a. Urusan Sosial :
 - Perbedaan kebijakan dan sistem yang berlaku pada lembaga mitra berdampak pada responsivitas lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Permasalahan sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara pasti, sehingga menyulitkan rencana intervensi penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Dengan kata lain cakupan ketugasan dan kegiatan pada urusan sosial sebagian besar bersifat adang-adang atau *unpredictable*. Hal ini juga

menjadikan kesulitan tersendiri dalam menentukan target layanan SPM maupun target sasaran kegiatan.

- Refocusing anggaran menyebabkan beberapa indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Kebijakan Satu Data Kemiskinan yang pendataannya dipusatkan pada Kementerian Sosial terdapat permasalahan dalam hal parameter, mekanisme pendataan, prosedur dan kecepatan akses data oleh daerah. Hal ini berdampak pada akurasi intervensi penanggulangan kemiskinan di daerah.

b. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi :

- Terbatasnya minat pencari kerja hanya pada jenis-jenis pelatihan tertentu saja.
- Informasi terkait pelatihan belum secara luas menjangkau masyarakat walaupun publikasinya sudah terintegrasi dalam JSS.
- Masyarakat terlalu selektif dalam memilih pekerjaan terkait dengan lokasi maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang dekat (dalam Pulau Jawa) dan jenis pekerjaan di dalam kantor lebih diminati masyarakat.

Adapun di awal tahun 2022 seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru terkait SPM (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM), maka layanan SPM beserta targetnya dicantumkan dalam perencanaan mulai pada Renstra OPD 2022 – 2026 hingga Renja OPD 2023 sebagaimana substansinya tercantum dalam tabel 2.2 tersebut di atas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan umum baik di daerah maupun tingkat nasional. Terjadinya pandemi COVID 19 secara meluas membuat masalah kemiskinan menjadi lebih berat. Pandemi ini telah meruntuhkan berbagai sendi kehidupan, terutama

bidang ekonomi. Hal ini memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan dan marjinal, bahkan kelompok masyarakat yang mampu tingkat sosial ekonominya pun dapat turun secara drastis. Akibatnya jumlah penduduk miskin dan rentan bertambah.

Hal mendasar yang perlu dipastikan dalam menangani kemiskinan dan kerentanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang potensial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dapat diintervensi melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan, maka sasaran penerima manfaat perlu diperluas baik dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Direncanakan pemberian bantuan sosial dengan sasaran penerima lanjut usia miskin, penyandang disabilitas, keluarga miskin yang belum mendapatkan intervensi program, warga miskin yang meninggal untuk mendapatkan santunan kematian, warga miskin yang meninggal dan terlantar atau keluarganya tidak mampu untuk biaya pemakamannya dan bantuan untuk orang terlantar kehabisan bekal.

Berkaitan dengan pemberian bantuan sosial, basis data menjadi sangat krusial. Akurasi data kemiskinan mempunyai korelasi yang signifikan terhadap ketepatan, efisiensi dan efektivitas intervensi kemiskinan. Oleh karena diperlukan pencermatan dan verifikasi validasi data yang optimal dengan melibatkan unsur wilayah. Hal ini krusial dilakukan dalam penentuan keluarga penerima manfaat/penerima bantuan sosial yang diarahkan kepada tersusunnya Perangkingan DTKS. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kebijakan Satu Data Kemiskinan yang diakomodasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial).

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinsosnakertrans berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal yg diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Dalam pelayanan berbasis SPM ini, maka diimplementasikan dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Rehabilitasi Sosial dengan mengcover sasaran anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana.

Adapun tentang penyandang disabilitas, permasalahan yang dirasakan diantaranya terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan tenaga pendamping yang kompeten. Dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka dibentuk Komite Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Adapun tugas Komite ini adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain pembentukan Komite sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan pembentukan dan peningkatan intensitas pelatihan tenaga pendamping/keluarga, Rumah Layanan Disabilitas termasuk untuk pekerja disabilitas, fasilitasi bantuan sarpras dan bantuan lainnya.

Adapun untuk masyarakat yang potensial, diintervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan. Intervensi program ini bertujuan membangun kesadaran untuk mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Pemberian bantuan untuk mengatasi permasalahan secara terus menerus di satu sisi justru dapat melemahkan daya juang masyarakat.

Berkenaan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdapat permasalahan kurang aktifnya PSKS di beberapa wilayah yang antara lain disebabkan oleh dualisme jabatan personil PSKS pada lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kesibukan individu dan kurang bagusnya proses regenerasi kepengurusan PSKS di wilayah. Oleh karena itu diperlukan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas dan motivasi bagi PSKS agar mempunyai komitmen tinggi dalam rangka membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapi adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, namun di sisi lain terdapat animo yang rendah dalam kepesertaan pelatihan ketrampilan tersebut. Dengan demikian perlu dikembangkan metode dan pemilihan jenis dalam penyelenggaraan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dan dinamika pasar sehingga tepat guna.

Seiring dengan program pelatihan berbasis kompetensi, diperlukan penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan teknis peserta dapat lanjut mengikuti program pemagangan untuk mengimplementasikan ketrampilan yang telah diperoleh dari pelatihan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan program pemagangan mampu mendorong peserta pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan).

Mengingat di masa pandemi terdapat penurunan kesempatan kerja, maka perlu terobosan perluasan kesempatan kerja, antara lain dengan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya. Diharapkan dengan adanya program tersebut mampu menyerap tenaga kerja di wilayah.

Isu ketenagakerjaan lainnya adalah perlu adanya sosialisasi intensif terkait penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Daerah), penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, Bursa Kerja Khusus, Konsultasi dan fasilitasi seleksi pencari kerja. Diharapkan pencari kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri.

Berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan industrial, terdapat isu perlunya optimalisasi UMK pada perusahaan skala kecil, implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan dan perlunya penurunan volume sengketa pekerja dan perusahaan. Menjawab isu tersebut, maka perlu optimalisasi KIE pada perusahaan antara lain Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha diperlukan untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa.

Pembinaan sebagai salah satu implementasi KIE dilakukan pula untuk mewujudkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

Selain itu perlu diupayakan peningkatan peran kelembagaan dalam hal kesejahteraan pekerja, yaitu antara lain Dewan Pengupahan Kota, Tim Deteksi Dini dan LKS Tripartit.

Dalam hal transmigrasi, terdapat permasalahan yaitu kurangnya animo/partisipasi warga miskin, kurangnya komitmen dan mental para transmigran dan pembangunan kawasan daerah tujuan yang kurang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kerjasama daerah. Oleh karena itu para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar “siap” baik secara fisik, psikis maupun kapasitas personalnya untuk ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu dalam rangka peningkatan minat warga miskin untuk bertransmigrasi perlu dioptimalkan jejaring dan peran tokoh masyarakat di wilayah dalam sosialisasi program transmigrasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran pasca penempatan juga perlu dilakukan secara optimal untuk meminimalisasi kegagalan transmigran di daerah penempatan. Dan juga perlu optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan advokasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam program transmigrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026. Rancangan Renja Tahun 2023 dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penyusunan program kerja tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut, meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap 4 (empat) kelompok rentan (meliputi penyandang disabilitas, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis) dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan. Terdapat 4 program, 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 573.861.720 Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 3.994.627.944, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp 2.627.847.020, dan Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp 1.360.287.120. Program Rehabilitasi Sosial dalam hal ini telah mengakomodasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada UPT Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo dan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (RPSLU) Budhi Dharma. Dan khusus untuk program Rehabilitasi Sosial terdapat penurunan pagu anggaran dibandingkan rancangan awal RKPD antara lain karena menyesuaikan dengan kebijakan program kegiatan Bantuan Keuangan Khusus DIY yang belum ada kejelasan sehingga tidak diperhitungkan dalam Renja dan penyusunan Pra RKA tahun 2023.

Urusan tenaga kerja, terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 232.793.250, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.517.136.260, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 1.297.519.800, dan Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp 863.710.350. Sedangkan urusan transmigrasi hanya terdapat 1 program yakni Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp 222.276.715.

Sedangkan operasional perkantoran dan pendukung manajemen dilaksanakan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.054.015.597. Anggaran tersebut juga memuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Pada program ini terdapat perubahan (sedikit penurunan) pagu anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan ketentuan standard harga dan dinamika kebutuhan menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan.

RENJA DIN SOSNAKERTRANS 2023

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini, terdapat dinamika perubahan dibandingkan rancangan awal RKPD. Terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit kenaikan pagu, namun di sisi lain banyak program kegiatan yang mengalami penurunan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami sedikit penurunan sebagaimana tertuang pada tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Cata tan Pen ting |
|----|--|--|--|-------------------|-----------------------|--|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| A | PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 14.060.121.838 | PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 14.054.015.597 | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 18 dokumen | 59.900.980 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 18 dokumen | 73.801.880 | |
| | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 5.470.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 5.470.000 | |
| | b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.370.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.370.000 | |
| | c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.370.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.370.000 | |
| | d | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 dokumen | 1.600.450 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | 1 dokumen | 1.591.232 | |

RENA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | Dokumen DPA-SKPD | | | | SKPD | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--|
| | | e | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.600.450 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.609.668 | |
| | | f | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 laporan | 48.490.080 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 laporan | 62.390.080 | |
| | 2 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 13 dokumen | 11.026.105.000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 13 dokumen | 11.026.105.000 | |
| | | a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 orang/bulan | 11.022.955.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 orang/bulan | 11.022.955.000 | |
| | | b | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 3.150.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 3.150.000 | |
| | 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah | 41 laporan | 24.820.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah | 41 laporan | 24.820.000 | |
| | | a | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 dokumen | 1.800.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 dokumen | 1.800.000 | |
| | | b | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 1.800.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 1.800.000 | |
| | | c | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 laporan | 15.760.000 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 laporan | 15.760.000 | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--------------------|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|--|
| | | d | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 1.080.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 1.080.000 | |
| | | e | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 laporan | 1.980.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 laporan | 1.980.000 | |
| | | f | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 12 dokumen | 2.400.000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 12 dokumen | 2.400.000 | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 213 dokumen | 5.220.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 213 dokumen | 5.220.000 | |
| 4 | | a | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 213 dokumen | 5.220.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 213 dokumen | 5.220.000 | |
| | | b | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 72 laporan | 519.214.252 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 72 laporan | 520.350.111 | |
| | | c | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 8.753.220 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 8.729.500 | |
| | | d | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 154.997.692 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 150.423.671 | |
| | | e | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 paket | 40.171.580 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 paket | 40.948.180 | |
| | | f | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 30.483.760 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 30.483.760 | |

REKA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|-------------------|----------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| | | g | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 6.900.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 6.900.000 |
| | | h | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 106 laporan | 277.908.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 106 laporan | 282.865.000 |
| | 5 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 6 unit | 38.782.500 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 6 unit | 33.001.000 |
| | | a | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 unit | 11.883.500 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 unit | 10.500.000 |
| | | b | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 26.899.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 22.501.000 |
| | 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 36 laporan | 1.969.427.606 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 36 laporan | 1.952.686.106 |
| | | a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12.600.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12.600.000 |
| | | b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 73.800.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 73.800.000 |
| | | c | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.883.027.606 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.866.286.106 |
| | 7 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah | 64 unit | 416.651.500 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah | 64 unit | 418.031.500 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|---|-------------|----------------------|--|---|-------------|----------------------|--|--|
| | | | Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | a | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 75 orang | 55.562.375 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 75 orang | 55.723.000 | | |
| | | b | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 orang | 174.156.850 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 orang | 189.490.600 | | |
| | | c | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 keluarga | 31.920.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 keluarga | 31.920.000 | | |
| | | d | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 lembaga | 312.281.170 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 lembaga | 296.728.120 | | |
| C | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Kota Yogya karta, Semua | | 4.234.703.284 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | 3.994.620.944 | | |

REKA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------|---------------|---|--|------------|---------------|--|
| 1 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | 330 orang | 3.780.033.644 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | 330 orang | 3.780.033.644 | |
| | a | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 orang | 77.240.000 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 orang | 27.915.000 | |
| | b | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 3620 orang | 899.591.800 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 3620 orang | 669.590.810 | |
| | c | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 260 orang | 120.599.120 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 260 orang | 120.599.120 | |
| | d | | Fasilitasi | Jumlah Orang yang | 5 orang | 10.176.00 | Fasilitasi | Jumlah Orang yang Terpenuhi | 5 orang | 10.176.00 | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|----------------------|---|---|-----------|----------------------|
| | | Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | 0 | Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | 00 |
| | e | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 orang | 274.489.420 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 orang | 323.814.220 |
| | f | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 orang | 2.420.000 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 orang | 2.420.000 |
| | g | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 350 orang | 19.325.000 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 350 orang | 19.325.000 |
| | | UPT. RPSLU BUDIDARMA | | | 1.544.032.584 | UPT. RPSLU BUDIDARMA | | | 1.544.025.584 |
| | a | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 848.253.360 | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 848.253.360 |
| | b | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 106.063.000 | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 106.063.000 |
| | c | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra | 5 orang | 2.400.000 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra | 5 orang | 2.400.000 |
| | d | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 587.316.224 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma | 68 orang | 587.316.224 |
| | | UPT. RPA WILOSOPROJO | | | 832.159.720 | UPT. RPA WILOSOPROJO REHABILITASI SOSIAL | | | 832.159.720 |

REKA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|-------------|---|--|----------|-------------|
| | a | Penyediaan Permakanaan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 353.443.000 | Penyediaan Permakanaan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 353.443.000 |
| | b | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 67.970.000 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 67.970.000 |
| | c | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 53.500.000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 53.500.000 |
| | d | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 162.126.720 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 162.126.720 |
| | e | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 195.120.000 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang | 195.120.000 |
| 2 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani | | 444.669,640 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani | | 444.595.490 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------|---|--|---|--------------|----------------------|--|
| | | a | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 orang | 138.321.520 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 orang | 138.321.370 | |
| | | b | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 orang | 242.352.000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 orang | 242.278.000 | |
| | | c | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 orang | 63.996.120 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 orang | 63.996.120 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Kota Yogya karta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.110.847.220 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | 3.110.847.220 | |
| D | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.110.847.220 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.627.847.020 | |
| | 1 | a | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 144101 orang | 1.662.426.280 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 144101 orang | 1.662.426.280 | |

RENA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---|--|----------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------|--|
| | | b | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 32078 keluarga | 798.795.940 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 32078 keluarga | 798.795.740 | |
| | | c | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 orang | 649.625.000 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 166.625.000 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100% | 1.360.287.120 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | 1.360.287.120 | |
| E | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | | 1.001.446.120 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | | 1.001.446.120 | |
| | 1 | | a | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 8000 orang | 1.000.006.120 | Penyediaan Makanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 8000 orang | 1.000.006.120 | |
| | | b | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 orang | 720.000 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 orang | 720.000 | |
| | | c | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 orang | 720.000 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 orang | 720.000 | |
| | 2 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan | 3 organisasi sosial | 358,841,000 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan | 3 organisasi sosial | 358,841,000 | |

REKA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana | | | Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana | | | |
|---|---|---|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------------|
| | | a | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 kampung | 2.160.000 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 kampung | | 2.160.000 |
| | | b | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 64 orang | 356.681.000 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 64 orang | | 356.681.000 |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | 3.940.013.200 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 3.911.159.660 |
| F | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja | 67,51% | 157.793.400 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja | | | 232.793.250 |
| | 1 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 dokumen | 157.793.400 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 dokumen | | 232.793.250 |
| | | a | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 0 dokumen 1 dokumen | 157.793.400 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang Disusun | 0 dokumen 1 dokumen | | 232.793.250 |
| G | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT | Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal | 91,56% | 1.517.136.460 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT | | | | | 1.517.136.260 |

REJENIA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | AS TENAGA KERJA | | | | AS TENAGA KERJA | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|---|--|--|------------------------------|-------------------|
| | 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi | 320 orang | 1.368.634 .260 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi | 320 orang | 1.368.63 4.260 |
| | | a | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 304 orang | 1.368.634 .260 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 304 orang | 1.368.63 4.260 |
| | 2 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina | 51 LPK | 113.972.2 00 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina | 51 LPK | 113.972. 000 |
| | | a | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 30 lembaga | 113.972.2 00 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 30 lembaga | 113.972. 000 |
| | 3 | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya | 40 perusahaan /IKM/IKM | 34.530.00 0 | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya | 40 perusahaan /IKM/IKM | 34.530.0 00 |
| | | a | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 40 perusahaan | 34.530.00 0 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 40 perusahaan | 34.530.0 00 |
| H | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | Persentase penempatan tenaga kerja | 70,63% | 1.401.372 .840 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | 1.297.51 9.800 |

RENA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------|--------------------|---|--|---|---------------|--------------------|--|
| | | a | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 88.435.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Sinkronisasi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di kota Yogyakarta (Pengguna Tenaga Kerja Asing) | | 13.435.000 | |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial | 40,33% | 863.710.500 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 863.710.500 | |
| 1 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perjanjian kerja di perusahaan | 423 perusahaan | 236.930.000 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 208.451.250 | |
| | | a | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 25 perusahaan | 36.896.000 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 25 perusahaan | 18.996.000 | |
| | | b | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 15 perusahaan | 24.566.000 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 15 perusahaan | 13.987.250 | |
| | | c | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 362 laporan | 175.468.000 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 362 laporan | 175.468.000 | |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------|-------------|---|--|--|-----------|-------------|
| | | | serta Pengupahan | | | | serta Pengupahan | | | | |
| | 2 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 626.780.500 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 655.259.100 |
| | | a | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4 perkara | 158.926.500 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4 perkara | 161.825.250 |
| | | b | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 3 perkara | 42.898.000 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) | | Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 90 persen | 21.378.000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|-------------------|------------|-----------------------|--|---|-------------------|--|-------------|-----------------------|
| | | SI | | | | | SI | | | | | |
| | 1 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 193.423.790 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 222.276.715 | |
| | | a Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8 laporan | 52.940.000 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kerjasama dengan daerah tujuan | 2 daerah | | 52.940.000 | |
| | | b Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | 8 kepala keluarga | 12.625.000 | | Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penempatan calon transmigran | 8 kepala keluarga | | 41.478.040 | |
| | | c Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 8 orang | 43.858.790 | | Pelatihan Transmigrasi | Calon transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan | 8 kepala keluarga | | 43.858.790 | |
| | | d Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi | 8 kepala keluarga | 84.000.000 | | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | Pemberianperbekalan kepada calon transmigran | 8 kepala keluarga | | 84.000.000 | |
| Total | | | | | | 27.473.317.147 | Total | | | | | 26.744.068.776 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 telah mengakomodasi pula beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM). Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah pelatihan keterampilan diantaranya Pelatihan Menjahit, Pelatihan Barista, Pelatihan Cake and Pastry, Pelatihan Social Media Marketing, Pelatihan Web Programmer, Pelatihan Membuat, Pelatihan Tata Rias Kecantikan, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Komputer. Namun karena adanya keterbatasan pagu anggaran, maka pemenuhan usulan masyarakat tidak dapat dicover secara keseluruhan dari aspek volume ataupun kuantitas sasaran kegiatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|---|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | RW 10 dan 11 wilayah Kampung Purbonegaran, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, | Penumbuhan UPPKS | V : 60 orang A : 10.000.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 2 | Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota | Kampung Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan menjahit + Hibah Alat | V : 30 orang A : 20.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.500.000,- Total anggaran Rp. 90.000.000,- Pelaksanaan 30 hari |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 3 | Pelatihan Barista tingkat kota | Kelurahan Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta | Pelatihan Barista tingkat kota | V : 20 orang ; A = 7.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 7.000.000,- Total anggaran Rp. 140.000.000,- Pelaksanaan 30 hari |
| 4 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kelurahan Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Sosialisasi Kegiatan P2WKSS | V: 30 orang A: 19.050.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 5 | Pelatihan Membatik tingkat kota | Balai RW 08, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan Batik Tulis | V: 20 orang x 4 kali A: 18.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 6 | Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota | RW 02, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Menambah Pendapatan Masyarakat Terutama Masyarakat Ekonomi Lemah | V: Warga RW 02 Terutama Warga yang Kurang Mampu A: 2.875.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari |
| 7 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | RW 11, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan social media marketing | V: 20 orang A: 2.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 8 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta | pelatihan marketing kue basah | V:Rw2 20org A:5.680.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 9 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta | FGD bagi Warga Kurang Mampu (KSJPS) | V : 100 Orang A : Rp 8.932.500,- | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | Kabupaten/ Kota |
|----|--|---|--|------------------------------------|---|
| 10 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta | FGD Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPK | V : 40 Orang A : Rp 4.360.000,- | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 11 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta | Penyuluhan dan Penguatan UP2K PKK untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Terbentuknya GaGe di Kelurahan Panembahan | V : 40 Orang A : Rp 4.360.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 12 | [Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih | Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta | Motivasi kepada Penyandang Disabilitas | V : 40 Orang A : Rp 4.360.000,- | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari |
| 13 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta | Workshop Ketahanan Keluarga | V : 50 Orang A : Rp 4.925.000,- | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |
| 14 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih | Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pengadaan fasilitas kursi roda dan krek untuk Lansia tidak mampu guna mendukung fasilitas mobilitas sehari-hari | V : 11 unit A ; 9,830,800,- | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari |
| 15 | Pelatihan Web Programmer tingkat kota | Pendopo Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Pelatihan Web Programmer tingkat kota Di era digitalisasi, Web sangat dibutuhkan dalam masyarakat | V= 30 orang 2 kali A= 7.530.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 16 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | Kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Pemberdayaan Difabel agar lebih produktif dan mandiri | V : 20 orang A : Rp. 2.650.000 | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |
| 17 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta | - Pelatihan Pijat Kebugaran bagi keluarga penyandang disabilitas - Penguatan sosial motivasi kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas yang tergolong tidak mampu - Warga disabilitas. | V : 1 kali A : Rp.4.590.000,- | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |

RENA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------|---|
| 18 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Sosialisasi Solidaritas Perempuan Lintas Iman | V : 50 orang A : 8.900.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 19 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kelurahan brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta | Pelatihan promosi online, pembuatan konten, foto dan video sederhana dari HP hingga mengunggah ke marketplace. | V=20orang ; A= Rp 5.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 20 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kampung Sanggrahan, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | pengadaan meja kursi pelatihan | V: 1 Paket A: Rp. 10.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 21 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | pendopo kelurahan giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Pemberian motivasi dan kurangnya pengetahuan dan penumbuhan motivasi untuk difabel | V= 30 orang A= 3.700.000 | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |
| 22 | Pelatihan Membatik tingkat kota | RW 13, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta | Pelatihan Membatik Sebagai Peningkatan Kapasitas Budaya dan juga Ekonomi di Wilayah. | | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 23 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | Kelurahan Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta | Pemberian motivasi pelatihan singkat bagi keluarga penyandang disabilitas | V: 20 orang A: 3.000.000 | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |
| 24 | Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota | Kampung Jlagran, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta | warga sama tidak memahami event organizer | V: 5 orang A: Rp 20.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 25 | Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota | Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta | Pelatihan Salon | V=15 orang A=1.500.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.300.000,- Total anggaran Rp. 86.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 26 | Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota | Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta | Pelatihan Menjahit untuk masyarakat umum | V : 1 paket A : 9000000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.500.000,- Total anggaran Rp. 90.000.000,- Pelaksanaan 30 hari |
| 27 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | RW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 Karangajen, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta | Pelatihan pemanfaatan digital marketing. | V = 7 peserta ; A = Rp. 14.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 28 | Pelatihan Web Programmer tingkat kota | Kampung Timuran, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta | Memberikan Pemahaman serta wawasan Perkembangan Teknologi dan Informasi. | V = 20 peserta ; A = Rp 40.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 29 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | POKJA 1 Kel. Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta | Workshop kader PAAR, Workshop Mitra Keluarga | V : 2 kali A :6.000.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 30 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Pelatihan fotografi dan video produk hingga cara membuat dan menjalankan marketing online. | Volume : 20 orang Anggaran : 40.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 31 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | Dalam situasi pandemic dan menyambut kemajuan teknologi menuntut kita melakukan adaptasi termasuk dalam metode wirausaha yang harus inovatif dengan Pelatihan promosi online, pembuatankonten, foto dan video sederhana dari HP hingga mengunggah ke market place | V : 3orang A : Rp.7.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 32 | Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin | Komisi Lansia Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | kurangnya bantuan bagi Lansia Mandiri | V : 10 orang A : 24.000.000 | Rekomendasi: disetujui Peserta: 5.216 Calon KPM Se-Kota Yogyakarta (calon penerima perlu diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan) Anggaran: 6.572.160.000 (Untuk 5.216 KPM se-Kota Yogyakarta) |
| 33 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | TPPKK Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | kurangnya bantuan sarana bagi Wanita Resiko Sosial dan Ekonomi | V : 20 orang A : 52.000.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 34 | Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota | RT 69 RW 19 Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta | Masih banyaknya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. | V=20 orang. | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.300.000,- Total anggaran Rp. 86.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 35 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kelurahan Patangpuluhan, WirobrajanKota Yogyakarta | Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM, | V : 40 org, 2 kali; A : 7.090.000,- | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 36 | Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota | RW 16 , 17 , 18 , 19 Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta | Belum bisa membuat produk UMKM yang lebih menarik dan pemasarannya. | V=30 orang. | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------|---|
| 37 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih | PKADD kelurahan kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pengadaan kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, | V=3 macam@2 pcs, A=15.000.000 | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari |
| 38 | Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota | RW 15, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Kursus mengemudi dan Layanan SIM A | V=10 orang A=20.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 2 angkatan (40 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 3.900.000,- Total anggaran Rp.156.000.000,- Pelaksanaan 4 hari |
| 39 | Pelatihan Membatik tingkat kota | Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan Ecoprint TP PKK | V : 34 orang A : 9.925.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 40 | Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota | Aula Kelurahan Baciro RW 11, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan membuat kue | | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta, diarahkan ke pelatihan cake&Pastry (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari |
| 41 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | RW 12, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Sosialisasi TOGA | V=1 periode A=1.100.000 | Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota |
| 42 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | 4 RW, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta | Pelatihan bunga kering | V= 4 RW A1.300.000 | Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari |
| 43 | Pelatihan Komputer tingkat kota | Kelurahan Karangwaru (PKK Kelurahan), Tegalrejo, Kota Yogyakarta | Pelaksanaan pelatihan Teknologi berbasis on-line. | V : 20 orang, A : 15.000.000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Pelaksanaan 10 hari |
| 44 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Dukuh, Mantrijeron, Kota Yogyakarta | mengikutkan sumber daya yang potensial untuk mendapatkan pelatihan lengkap untuk meningkatkan ketrampilannya sendiri dan sekaligus warga masyarakat lainnya dengan menularkan ilmunya | V = 30 org ; A = Rp 30.000.000,- | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 45 | Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota | RW 08, 09, dan 10 Kampung Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta | Pelatihan Pemasaran Online Bagi Pelaku Usaha Kuliner di Kampung Tegal Kemuning; | V 25 Org; A : 2500000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari |
| 46 | Pelatihan Barista tingkat kota | Mantrijeron, Kota Yogyakarta | Pelatihan Barista tingkat Kota | V=15 orang A= Rp 7.000.000,- | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 7.000.000,- Total anggaran Rp. 140.000.000,- Pelaksanaan 30 hari |
| 47 | Pelatihan Membuat tingkat kota | RW 11, 12 dan 13 Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta | Pelatihan Membuat Bagi Warga RW 11, 12, dan 13 Kampung Tegalpanggung; | V : 30 Org; A : 5000000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari |
| 48 | Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota | RW 12 Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta | Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Warga untuk meningkatkan peerekonomian Warga RW 12; | V 10 Org; A : 3000000 | Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|---|
| 49 | Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota | Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta | Pelatihan SIM A bagi Warga Kamoung Tegalpanggung; | V : 5 Orang; A : 5000000 | <p>Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 2 angkatan (40 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi)</p> <p>Anggaran @ Rp. 3.900.000,- Total anggaran Rp.156.000.000,- Pelaksanaan 4 hari</p> |
|----|---|---|---|--------------------------|---|

Selain mengakomodir beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan pula usulan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir (Pokok Pikiran Dewan) yang secara keseluruhan berjumlah 119 usulan. Usulan yang berasal dari wakil masyarakat (DPRD) yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari 119 usulan tersebut 93 usulan diterima dan 26 ditolak berdasarkan prioritas dengan alasan:

- a. Adanya keterbatasan pagu dan belum diprioritaskan mengingat usulan kegiatan bukan sebagai layanan SPM;
- b. Usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM); Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih; Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas; Pembentukan KUBE dan Sunatan Massal Tingkat Kota.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan POKIR yang diakomodir adalah Pelatihan Sosial Media Marketing, Pelatihan Menjahit Dasar, Pelatihan Membuat, Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Web Programmer tingkat kota, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Manajemen Event Organizer, Pelatihan Barista dan Pelatihan croom,ukir dan tatah perak, kuningan dan logam untuk pemuda. Dan selaras dengan usulan Musrenbang, maka dalam mengakomodasi usulan Pokir juga mempertimbangkan adanya keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, sehingga tidak dapat sepenuhnya mengcover volume dan kuantitas sasaran kegiatan yang diusulkan dalam Pokir.

Tabel 2.5

Usulan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kota Yogyakarta

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | Pelatihan Social Media Marketing | Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Kraton, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, | Pelatihan digital marketing | Peserta: 20 orang se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt | Jumlah Usulan: 28 Jumlah diterima : 28 Jumlah ditolak : 0 |
| 2 | Pelatihan Menjahit Dasar | Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Kotagede | Pelatihan menjahit untuk Ibu-ibu PKK RW 10 & 11 kampung Dukuh | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 90 jt | Jumlah Usulan : 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0 |
| 3 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede, | Penguatan sosial, dan pemberian motivasi kepada perempuan rawan sosial ekonomi yaitu perempuan dewasa yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tujuan agar dapat mengembangkan usahanya. | Belum diprioritaskan karena keterbatasan pagu dan bukan sebagai SPM bidang sosial kewenangan kab/kota | Jumlah Usulan : 23 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 23 |
| 4 | Pelatihan Membuat | Kecamatan Kotagede, Tegalrejo, Kraton, Danurejan, Gondokusuman, Mergangsan, Umbulharjo, Mantrijeron, Gedong Tengen | Mohon pelatihan membuat ecoprint | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 80 jt | Jumlah Usulan: 18 Jumlah diterima : 18 Jumlah ditolak : 0 |
| 5 | Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin | Kecamatan Gedong Tengen, Mantrijeron, Kotagede, Umbulharjo, Ngampilan, Jetis, Tegalrejo | Dulu pernah mendapatkan PKH tapi dicabut lagi padahal masih membutuhkan | Peserta: 5.216 Calon KPM Se-Kota Yogyakarta (calon penerima perlu diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan) Anggaran: 6.572.160.000 (Untuk 5.216 KPM se-Kota Yogyakarta) | Jumlah Usulan: 13 Jumlah diterima : 13 Jumlah ditolak : 0 |
| 6 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih | Kecamatan Wirobrajan | Memberikan sosialisasi dan motivasi pelatihan singkat untuk warga disabilitas dan pendamping agar dapat mandiri dan berfungsi sosial dengan baik. | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 66 jt | Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0 |
| 7 | Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota | Kecamatan Gondomanan dan Umbulharjo | Diadakan Pelatihan Tata Rias Kecantikan | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 86 jt | Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0 |
| 8 | Pelatihan Stir Mobil & SIM A di | Kecamatan Umbulharjo | Pelatihan montir | Peserta: 40 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 156 jt | Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0 |

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| 9 | Pelatihan Web Programmer tingkat kota | Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, dan Gondokusuman | Pelatihan Web Programmer tingkat kota Di era digitalisasi, Web sangat dibutuhkan dalam masyarakat | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt | Jumlah Usulan: 4 Jumlah diterima : 4 Jumlah ditolak : 0 |
| 10 | Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas | Kecamatan Umbulharjo | Pemberian motivasi dan kurangnya pengetahuan dan penumbuhan motivasi untuk difabel | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 53 jt | Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0 |
| 11 | Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran | Seluruh Kecamatan | supaya punya ketrampilan memasak | Peserta : 20 org se Kota Yk, di arahkan ke pelatihan cake & Pastry (calon peserta diseleksi) Anggaran : 57,5 jt | Jumlah Usulan: 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0 |
| 12 | Pelatihan Manajemen Event Organizer | Kecamatan Umbulharjo | Fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan event | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt | Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0 |
| 13 | Pelatihan Barista | Seluruh Kecamatan | pelatihan barista untuk pemanfaatan potensi usaha kopi | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 140 jt | Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0 |
| 14 | Penambahan Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor INFORMAL NON Penerima Upah untuk Warga Kota yang masuk dalam DTKS | Seluruh Kecamatan | Penambahan Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor INFORMAL NON Penerima Upah untuk Warga Kota yang masuk dalam DTKS | Kewenangan/Tusi Dinsosnakertrans lebih pada Sosialisasi Pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan , untuk BPJS sektor informal diampu oleh beberapa OPD teknis terkait (DisperinKop UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan) | Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 1 |
| 15 | Pembentukan KUBE | Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan dan Pakualaman | Pembentukan KUBE baru dengan narasumber Dhian Novitasari. | Peserta : 10 KUBE Penumbuhan se-Kota Yogyakarta. Anggaran : Rp 200.000.000,- (Rp 20.000.000,-/KUBE Penumbuhan) | Jumlah Usulan: 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0 |
| 16 | Sunatan Massal Tingkat Kota, | Kecamatan Kraton | Pemberian pelayanan sunatan masal | kuota 100 orang, anggaran: 85.222.501 | Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0 |

RENTAN DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--|--|---|
| 17 | Pelatihan croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam untuk pemuda | Kecamatan Kotagede | Pelatihan croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam untuk pemuda | Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi dan diutamakan di wilayah sudah ada kelompok/forum/lembaga yang bergerak di bidang croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam) Anggaran: Rp. 16.988.600,- | Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0 |
| 18 | Pelatihan Untuk Merawat ODGJ | Kecamatan Umbulharjo | | Merupakan Tusi/ kewenangan Dinas Kesehatan | Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 2 |
| Total : 119 Usulan | | | | | |
| Disetujui = 93 | | | | | |
| Tidak Disetujui = 26 | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat,
- c. Memantapkan peran dan fungsi lembaga dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

RENTJAN DINASOSNAKERTRANS 2023

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan masyarakat,
- c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan para pemangku kepentingan.
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022.
- e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi Walikota Yogyakarta dan amanat regulasi.

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada 2023 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

RENTAN DINASOSNAKERTRANS 2023

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

REKAPITULASI RENCANA DINSOSNAKERTRANS 2023

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan social daerah kabupaten/ kota
 - Peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/ kota
 - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Dinas
 - 1) Penyediaan Alat Bantu
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 6) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 7) Pemberian Layanan Rujukan

RENA DIANSOSNAKERTRANS 2023

- UPT RPSLU Budi Dharma
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

 - UPT RPA Wiloso Projo
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- 6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
 - c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Transmigrasi
 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada rancangan awal RKPD, maka terdapat dinamika perubahan dimana terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit kenaikan pagu, namun di sisi lain banyak program kegiatan yang mengalami penurunan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami sedikit penurunan dari Rp. 27.473.317.147,- menjadi Rp. 26.744.068.776,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada nomenklatur dan indikator output sub kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja OPD. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belanja operasional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program, kegiatan berikut pendanaannya tersaji dalam Tabel.4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023
Tahun 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|---|-------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------|--|-------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|---|--|-----------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluara n Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 20,234,447,097 | | | | | 18,606,996,438 | | |
| 1 | | | | | | | | | 14,054,015,597 | | | | | 14,061,502,138 | | |
| 1 | | | 2.0 | | | | | | 73,801,880 | | | | | 59,901,280 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3 Dokumen | | 5,470,900 | Lain-lain PAD Yang Sah | | 5,470,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Dokumen | | 1,370,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | 1,370,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Dokumen | | 1,370,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | 1,370,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan | | Jumlah Dokumen | | Kota Yogyakarta | | 1 | | 1,591,232 | Lain- | | 1,600,450 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|---|--|------------|--|------------|------------------------|--|--|------------|
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2 Dokumen | | 1,800,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 1,800,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Dokumen | | 1,800,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 1,800,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12 Laporan | | 15,760,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 15,760,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12 Laporan | | 1,080,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 1,080,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2 Laporan | | 1,980,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 1,980,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik | | Kota Yogyakarta, | | 12 Dokumen | | 2,400,000 | Lain-lain PAD | | | 2,400,000 |

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|--|-------------|--|--------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | | Daerah SKPD | | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Yang Sah | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 5,220,000 | | | | | 5,220,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 213 Dokumen | | 5,220,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 5,220,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 520,350,111 | | | | | 519,214,252 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|----------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 06 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | Kota Yogyakar ta, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n | | 4 Paket | | 8,729,500 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | | 8,753,220 |
| 1 06 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Kota Yogyakar ta, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n | | 12 Paket | | 150,423,671 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | | 154,997,692 |
| 1 06 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | Kota Yogyakar ta, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n | | 10 Paket | | 40,948,180 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | | 40,171,580 |
| 1 06 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan | | Kota Yogyakar ta, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n | | 12 Paket | | 30,483,760 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | | 30,483,760 |
| 1 06 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | | Kota Yogyakar ta, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n | | 3 Dokume n | | 6,900,000 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | | 6,900,000 |
| 1 06 01 2.06 09 | Penyelenggaraan | | Jumlah Laporan | | Kota Yogyakar | | 106 | | 282,865,000 | Lain- | | | | 277,908,000 |

REJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|------------|--|----------------------|------------------------|--|--|--|----------------------|
| | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Laporan | | | lain PAD Yang Sah | | | | |
| 1 06 01 2,0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 33,001,000 | | | | | 38,782,500 |
| 1 06 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6 Unit | | 10,500,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 11,883,500 |
| 1 06 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4 Unit | | 22,501,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 26,899,000 |
| 1 06 01 2,0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 1,952,686,106 | | | | | 1,969,427,606 |
| 1 06 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12 Laporan | | 12,600,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 12,600,000 |
| 1 06 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12 Laporan | | 73,800,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 73,800,000 |
| 1 06 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12 Laporan | | 1,866,286,106 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 1,883,027,606 |
| 1 06 01 2,0 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 418,031,500 | | | | | 418,031,500 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|----------|--|--------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 1 06 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit | | 19,360,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 19,360,000 |
| 1 06 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64 Unit | | 287,246,500 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 287,246,500 |
| 1 06 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 Unit | | 7,025,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 7,025,000 |
| 1 06 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63 Unit | | 54,100,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 54,100,000 |
| 1 06 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit | | 50,300,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 50,300,000 |
| 1 06 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | 573,861,720 | | | | 573,861,720 |
| 1 06 02 3 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 573,861,720 | | | | 573,861,720 |
| 1 06 02 2.03 01 | Peningkatan Kemampuan | | Jumlah Orang Mendapat | | Kota Yogyakarta | 75 Orang | | 55,723,000 | Lain- | | | 55,723,000 |

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial | | a, Semua | | | | | | lain PAD Yang Sah | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|----------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| 1 06 02 2.03 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 14 Orang | | 189,490,600 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 189,490,600 |
| 1 06 02 2.03 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 24 Keluarga | | 31,920,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 31,920,000 |
| 1 06 02 2.03 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5 Lembaga | | 296,728,120 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 296,728,120 |
| 1 06 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | 1,618,435,640 | | | | | 948,919,180 |
| 1 06 04 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | 1,173,840,150 | | | | | 504,249,540 |
| 1 06 04 2.01 03 | Penyediaan Alat Bantu | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15 Orang | | 27,915,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 77,240,000 |

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|---|--|------------|--|-------------|------------------------|--|--|--|-------------|
| | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 1 06 04 2.01 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3620 Orang | | 669,590,810 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 0 |
| 1 06 04 2.01 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 260 Orang | | 120,599,120 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 120,599,120 |
| 1 06 04 2.01 07 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5 Orang | | 10,176,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 10,176,000 |
| 1 06 04 2.01 08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 200 Orang | | 323,814,220 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 274,489,420 |
| 1 06 04 2.01 11 | Pemberian | | Jumlah Orang yang | | Kota | | 5 Orang | | 2,420,000 | Lain- | | | | 2,420,000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|---|----------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--|--|----------------------|
| | Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Lain PAD Yang Sah | | | | |
| 1 06 04 2.01 12 | Pemberian Layanan Rujukan | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 350 Orang | | 19,325,000 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 19,325,000 |
| 1 06 04 2.0 2 | Rehabilitasi Sosial Luar Panti Sosial | Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di | | | | | | 444,595,490 | | | | | | 444,669,640 |
| 1 06 04 2.02 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500 Orang | | 138,321,370 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 138,321,520 |
| 1 06 04 2.02 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 Orang | | 242,278,000 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 242,352,000 |
| 1 06 04 2.02 10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150 Orang | | 63,996,120 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 63,996,120 |
| 1 06 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | 2,627,847,020 | | | | | | 1,662,426,280 |
| 1 06 05 2.0 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 2,627,847,020 | | | | | | 1,662,426,280 |
| 1 06 05 2.02 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144101 Orang | | 1,662,426,280 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 1,662,426,280 |
| 1 06 05 2.02 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan | 32078 Keluarga | | 798,795,740 | | Lain-lain PAD | | | | 0 |

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|--------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | Kesejahteraan Keluarga | | Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | n, Semua Kelurahan | | | | | Yang Sah | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|--------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|----------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 06 05 2.02 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 50 Orang | | 166,625,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 0 |
| 1 06 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | 1,360,287,120 | | | | | 1,360,287,120 |
| 1 06 06 2.0 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | 1,001,446,120 | | | | | 1,001,446,120 |
| 1 06 06 2.01 01 | Penyediaan Makanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8000 Orang | | 1,000,006,120 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 1,000,006,120 |
| 1 06 06 2.01 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 70 Orang | | 720,000 | | | | | 720,000 |
| 1 06 06 2.01 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 70 Orang | | 720,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 720,000 |
| 1 06 06 2.0 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | 358,841,000 | | | | | 358,841,000 |
| 1 06 06 2.02 01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3 Kampung | | 2,160,000 | Lain-lain PAD Yang | | | | 2,160,000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| | Bencana | | Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kelurahan | | | | | Sah | | | |
| 1 06 06 2.02 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 64 Orang | | 356,681,000 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | 356,681,000 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 3,911,159,660 | | | | 3,911,160,160 |
| 2 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | |
| 2 07 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | | | 232,793,250 | | | | 232,793,400 |
| 2 07 02 2 0 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | | | 232,793,250 | | | | 232,793,400 |
| 2 07 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Dokumen | | 232,793,250 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | 232,793,400 |
| 2 07 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | 1,517,136,260 | | | | 1,517,136,460 |
| 2 07 03 2 0 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | 1,368,634,260 | | | | 1,368,634,260 |
| 2 07 03 2.01 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 304 Orang | | 1,368,634,260 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | 1,368,634,260 |
| 2 07 03 2 0 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | 113,972,000 | | | | 113,972,200 |
| 2 07 03 2.02 01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 30 Lembaga | | 113,972,000 | Lain- lain PAD Yang Sah | | | 113,972,200 |
| 2 07 03 2 0 | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | | | 34,530,000 | | | | 34,530,000 |
| 2 07 03 2.04 01 | Pelaksanaan | | Jumlah Perusahaan | | Kota Yogyakarta | | 40 | | 34,530,000 | Lain- | | | 34,530,000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|
| | Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | | a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Perusahaan | | | | Lain PAD Yang Sah | | | |
| 2 07 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | 1,297,519,800 | | | | | 1,297,519,800 |
| 2 07 04 2,0 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 1,108,598,050 | | | | | 1,108,598,000 |
| 2 07 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 300 Orang | | 18,450,000 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 18,450,000 |
| 2 07 04 2.01 04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 135 Perusahaan | | 17,360,000 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 17,360,000 |
| 2 07 04 2.01 05 | Perluasan Kesempatan Kerja | | Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga kerja lokal yang mengikuti Padat Karya | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 304 Orang | | 1,072,788,050 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 1,072,788,000 |
| 2 07 04 2,0 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | 175,486,750 | | | | | 175,486,800 |
| 2 07 04 2.03 02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus (BKK) | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 41 BKK 200 orang | | 83,876,750 | | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 83,876,800 |

RENJA DIASOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|---------------------|--|-------------------|--|----------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | | | |
| 2 07 04 2.03 03 | Job Fair/Bursa Kerja | | Terlaksananya kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Kegiatan | | 91,610,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 91,610,000 |
| 2 07 04 2.05 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 13,435,000 | | | | | 13,435,000 |
| 2 07 04 2.05 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Sinkronisasi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di kota Yogyakarta (Pengguna Tenaga Kerja Asing) | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 35 Perusahaan | | 13,435,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 13,435,000 |
| 2 07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | 863,710,350 | | | | | 863,710,500 |
| 2 07 05 2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 208,451,250 | | | | | 208,451,250 |
| 2 07 05 2.01 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 25 Perusahaan | | 18,996,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 18,996,000 |
| 2 07 05 2.01 02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15 Perusahaan | | 13,987,250 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 13,987,250 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|---|--|--------------|--|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------|
| 2 07 05 2.01 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 362 Laporan | | 175,468,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 175,468,000 |
| 2 07 05 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 655,259,100 | | | | 655,259,250 |
| 2 07 05 2.02 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4 Perkara | | 161,825,250 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 161,825,250 |
| 2 07 05 2.02 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 90 Persen | | 21,378,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 21,378,000 |
| 2 07 05 2.02 03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2 Organisasi | | 69,318,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 69,318,000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------|--|--------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 07 05 2.02 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Lembaga | | 54,516,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 54,516,000 |
| 2 07 05 2.02 05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 159 Orang | | 348,221,850 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 348,222,000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | 222,276,715 | | | | | 222,276,765 |
| 3 32 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | 222,276,715 | | | | | 222,276,765 |
| 3 32 03 2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 222,276,715 | | | | | 222,276,765 |
| 3 32 03 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Kerjasama dengan daerah tujuan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2 Daerah | | 52,940,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 52,940,000 |
| 3 32 03 2.01 04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Penempatan calon transmigran | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8 Kepala Keluarga | | 41,478,040 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 41,478,040 |
| 3 32 03 2.01 06 | Pelatihan Transmigrasi | | Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan | | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8 Kepala Keluarga | | 43,858,675 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 43,858,725 |
| 3 32 03 2.01 07 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | | Pemberian perbekalan kepada calon transmigran | | Kota Yogyakarta, Semua | | 8 Kepala Keluarga | | 84,000,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | | 84,000,000 |

RENJA DIANSOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Program | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | Kecamata n, Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 24,367,883,47 | | | | | 22,740,433,36 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | 1,544,032,584 | | |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | 1,544,032,584 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | 1,544,032,584 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma | | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan | | 68 Orang | | 848,251,360 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 848,253,360 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma | | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan | | 68 Orang | | 106,063,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 106,063,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma | | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan | | 5 Orang | | 2,400,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 2,400,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma | | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan | | 68 Orang | | 587,311,224 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 587,316,224 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1,544,025,584 | | | 1,544,032,584 | | |

REJENIA DIN SOSNAKERTRANS 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | 832,159,720 | | |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | 832,159,720 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | 832,159,720 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | | 30 Orang | | 353,443,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 353,443,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | | 30 Orang | | 67,970,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 67,970,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | | 30 Orang | | 53,500,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 53,500,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 30 Orang | | 162,126,720 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 162,126,720 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | | 30 Orang | | 195,120,000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | | 195,120,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 832,159,720 | | | 832,159,720 | |

RENJA DINASNAKERTRANS 2023

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Manakala ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula pencapaian target kinerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA**



DRS. MARYUSTION TONANG, MM.